

FRAMING JOKO WIDODO DAN PRABOWO SUBIANTO DI HARIAN KOMPAS DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019

Prinisia Nurul Ikasari¹, Anisa Setya Arifina²
Universitas Tidar^{1,2}

Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Magelang
E-mail: prinisia.nurul@untidar.ac.id¹, anisaarifina@untidar.ac.id²

Abstract: *In the context of campaigns and political interests, the image of individuals or political candidates can be created and supported by the public through the mass media. For this reason, it is very important and interesting to be able to see the frame or framing of the second pair of Joko Widodo-Ma'ruf Amin and Prabowo Subianto-Sandiaga Uno in the 2019 Election in the Kompas Newspaper mass media. The method used in this research is the analysis of media text content with data analysis through the Robert N. Entman framing model using the constructionism paradigm through qualitative research methods. The results showed Kompas conducted different framing on several news stories on the two Presidential Candidates in the 2019 election. The same framing occurred in several reports in the discussion of human rights issues.*

Key words: *framing, Pemilu 2019, Mass Media, Politic.*

Abstrak: *Dalam konteks kampanye dan kepentingan politik, image perseorangan atau kandidat politik bisa diciptakan dan didistribusikan kepada masyarakat melalui media massa. Untuk itu menjadi sangat penting dan menarik jika dapat melihat bingkai atau framing kedua paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 di dalam media massa Koran Kompas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi teks media dengan analisis data melalui framing model Robert N. Entman pendekatan paradigma konstruksionisme melalui metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas melakukan pembingkai yang berbeda pada beberapa berita terhadap kedua paslon Capres pada pemilu 2019. Pembingkai yang sama terjadi pada beberapa pemberitaan dalam pembahasan isu HAM.*

Kata kunci: *framing, Pemilu 2019, Media Massa, Politik.*

Pendahuluan

Identitas merupakan ciri khas dan tanda pengenal bagi individu. Namun rupanya identitas tidak hanya berguna bagi individu pemiliknya tapi juga dipandang sebagai komoditas oleh elit politik untuk meraih kekuasaan. Politisasi identitas marak terjadi dan menjadi kekuatan yang ampuh terutama saat Pemilihan Umum (Pemilu). Politik identitas berawal dari persamaan ideologi, teritorial, etnis, dan agama yang kemudian dijadikan alat untuk mendapatkan simpati dan legitimasi dari masyarakat. Herdiansah (2017: 176-177) menyebutkan adanya kampanye hitam pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang memojokkan lawan politik dan seringkali menyinggung karakteristik agama dan etnis kandidat. Joko Widodo dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan keturunan Cina yang anti Islam. Sementara Prabowo Subianto diidentikkan dengan sosok militer yang diktator dan didukung oleh kelompok Islam radikal serta intoleran. Setelah itu politisasi identitas terus berlanjut dengan munculnya sentimen agama yang mewarnai Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Petahana Basuki Tjahaja Purnama dituduh melakukan penistaan terhadap Islam ketika melakukan pidato kedinasan di Kepulauan

Seribu hingga munculnya peristiwa Aksi Bela Islam.

Maraknya diskursus yang mengaitkan isu agama dan politik pasca Pilpres 2014 merupakan indikasi menguatnya politisasi identitas menuju Pemilu 2019. Isu-isu yang berkaitan dengan etnis, agama, atau ideologi tertentu digunakan oleh sebagian elit politisi untuk membangun citra negatif lawan-lawan politiknya (Herdiansah, 2017: 170). Dalam Seminar Evaluasi Pilkada 2015-2017 dan Proyeksi Pilkada 2018 serta Pilpres 2019 disebutkan bahwa kualitas Pilkada serentak tahun 2018 dinilai menurun karena muncul kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai politisasi SARA. Tapi di sisi lain politisasi SARA menjadi cara yang mudah dalam memobilisasi pemilih yang apatis¹.

Masalah agama, nasionalisme dan komunisme masih tetap akan dipakai pada Pilpres 2019. Wahid Institute menyebutkan 11 juta orang bersedia melakukan tindakan radikal, 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal dan 7,7% mau bertindak radikal jika memungkinkan. Tindakan radikal ini berupa ujaran kebencian dan menolak

¹ Suchahyo, Nurhadi. (2018). Politik Uang, Hoax, dan SARA Ancaman Pilkada dan Pilpres. Diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/politik-uang-hoax-dan-sara-ancaman-pilkada-dan-pilpres/4268990.html> pada tanggal 25 November 2018

orang yang tidak beriman menjadi pejabat negara². Wibisono (2018) menjelaskan bahwa situasi menjelang Pilpres 2019 semakin memanas ditandai dengan meningkatnya aksi saling lapor, perang tagar, hingga mobilisasi massa. Istilah “cebong” dan “kampret” serta #GantiPresiden2019 tidak hanya meramaikan media sosial tapi juga dinilai sebagai aksi saling serang antara dua kubu politik. Fenomena ini disebut *digital vigilantism dimana* saat sekelompok warga negara dibuat tersinggung oleh aktivitas warga lainnya, kemudian membalas secara terkoordinasi menggunakan perangkat seluler dan *digital platform*. Kebanyakan kegiatan ini datang dari dua kelompok yaitu pro-pemerintah atau oposisi.

Aksi saling serang antar dua kubu politik tidak hanya terjadi secara *online*, tapi juga terjadi di ranah *offline*. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan rekapitulasi atas temuan atau laporan per tanggal 13 November 2018 dan menemukan terdapat 17 laporan dugaan pelanggaran terkait Pilpres. Dari 17 laporan tersebut, tujuh laporan untuk Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan enam laporan untuk paslon nomor urut dua yaitu Prabowo Subianto-

² Aziz, Nuraki. (2017). Agama dan Nasionalisme Alat Pemenangan Pilpres 2019?. Diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42340266> pada tanggal 25 November 2018

Sandiaga Uno. Laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye, kasus *hoax*, dan mahar politik (Mualim, 2018).

Peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di masyarakat selama masa pemilu baik Pilkada maupun Pilpres inilah yang kemudian menarik insan pers untuk menuliskannya menjadi sebuah berita. Beberapa media massa cenderung menyajikan berita dengan judul yang provokatif terkait politisasi agama dan etnis, misalnya saja ancaman Minahasa Merdeka yang dimuat di salah satu surat kabar lokal yaitu Radar Manado dengan judul “Tahan Ahok Atau Minahasa Merdeka”³. Ada juga tabloid Obor Rakyat berisi tentang sisi negatif Joko Widodo saat maju dalam Pilpres 2014 beredar di Jawa Timur dengan judul-judul yang ditampilkan di setiap halaman, seperti “Capres Boneka Suka Ingkar Janji”, “Disandera Cukong dan Misionaris”, “Dari Solo sampai Jakarta De Islamisasi ala Jokowi”, serta “Cukong-cukong di Belakang Jokowi”⁴. Hal ini terjadi karena

³ Risalah, Dian Fath. (2017). Bush, Amerika, dan Kelahiran Minahasa Merdeka. Diakses di <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/05/17/oq2cy5377-bush-amerika-dan-kelahiran-gerakan-minahasa-merdeka> pada tanggal 25 November 2018

⁴ Taufiqurrahman. (2014). Tabloid “Capres Boneka” Bergambar Jokowi Beredar di Masjid-Masjid. Diakses di <https://regional.kompas.com/read/2014/05/26/1257026/Tabloid.Capres.Boneka.Bergambar.Jokowi.Be>

semenjak pembatasan jumlah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sudah tidak ada lagi, maka banyak bermunculan penerbitan baru dengan kualitas yang beragam dari yang bermutu baik hingga yang berkualitas “sampah”. Peningkatan kuantitas media belum disertai dengan perbaikan kualitas jurnalismenya. Sistem pers didikte oleh kekuatan pasar, isinya cenderung sensasional, kurang penghargaan pada etika, berita bohong, provokatif, dan pembunuhan karakter. Pers kerap dipakai sebagai kepentingan politik pribadi ataupun kelompok tertentu (Hutagalung, 2013: 57).

Media massa memiliki fungsi menyediakan dan mendistribusikan informasi yang bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan atas persoalan publik. Dalam konteks kampanye dan kepentingan politik, *image* perseorangan atau kandidat politik bisa diciptakan dan didistribusikan kepada masyarakat melalui media massa. Dalam pembangunan *image* politik, proses komunikasi kerap sekali terjadi secara tidak langsung melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa (Hasyim, 2016: 35).

Meskipun *Kompas* menjadi harian nasional yang secara konsisten mampu memberitakan masalah kebebasan beragama dan toleransi antar umat

beragama (Suryana, 2017: 9), namun *Kompas* juga membingkai berita-beritanya agar mengdssshasilkan konstruksi citra tertentu sesuai dengan kepentingan atau kekuatan pasar. Misalnya pada Pilpres 2014, *Kompas* menekankan konstruksi maskulinitas Joko Widodo dan Prabowo Subianto dengan cara yang berbeda. Hasyim (2016: 49) mengemukakan bahwa maskulinitas Joko Widodo digambarkan melalui kredibilitas dan reputasi di dalam berita-berita di harian *Kompas*, sedangkan berita tentang Prabowo Subianto lebih menekankan karakter daripada reputasi dan kredibilitasnya. Untuk itu menjadi sangat penting dan menarik jika dapat melihat bingkai atau *framing* kedua paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 di dalam media massa *Kompas*. Oleh sebab itu maka pertanyaan permasalahan yang muncul adalah bagaimana *Kompas* membingkai paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dari bulan November 2018 hingga terlaksananya pemilu di bulan April 2019?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi teks media dengan pendekatan paradigma konstruksionisme melalui metode

redar.di.Masjid-masjid pada tanggal 25 November 2018

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfungsi untuk menggambarkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa yang dibingkai oleh surat kabar dan kemudian menjadi berita (Kriyantono, 2010). Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan dokumentasi pada pemberitaan pasangan calon presiden 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno serta Joko Widodo dengan K.H. Ma'ruf Amin di Koran *Kompas* yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimulai dari bulan November 2018 hingga bulan Maret 2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *framing* dengan model Robert N, Entman dikarenakan dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana *Framing* Joko Widodo dan Prabowo Subianto dilakukan di Harian *Kompas* dalam Pemilihan Presiden 2019. Robert N, Entman melihat *framing* dalam dua hal dimensi yang besar, yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Proses *framing* ini berkaitan dengan pemilihan isu, pemilihan fakta mana yang akan ditonjolkan. Dalam hal ini wartawan memiliki kekuatan untuk dapat melakukan proses seleksi tersebut.

Tabel 3.1 Model *Framing* Konseptual Robert N, Etman

<i>Problem Identification</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Causal Interpretation</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/ isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari beberapa berita dari *kompas* di bulan November 2018 yang diambil secara acak memperlihatkan bahwa *framing* yang dilakukan oleh koran *kompas* lebih memperlihatkan bagaimana Jokowi dipandang sebagai seorang Presiden yang memberikan wejangan atau nasehat-nasehat positif kepada bawahannya terkait dengan tuntutan netralitas TNI dalam pemilu. *Kompas* memilih *framing* atau pembingkaiian melalui penggambaran bahwa Jokowi meminta TNI untuk dapat tetap Netral dalam kancah perpolitikan yang terjadi saat itu.

Kemudian proses pembingkaiian (*framing*) di bulan November 2018 dilakukan melalui penggambaran Jokowi sebagai sosok seorang presiden yang dekat dengan rakyatnya dan tanggap akan situasi dan kondisi dimasyarakatnya. Hal ini dilakukan melalui pemberitaan pada proses penyelesaian perlindungan TKI di Arab Saudi. Ditengah sorotan kritikan terhadap perlindungan TKI di Arab Saudi, koran *kompas* membingkaii situasi ini dengan kondisi keprihatinan yang disampaikan oleh Jokowi selaku Presiden. Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan atas eksekusi Tuti Tursilawati yang dilakukan tanpa notifikasi kepada Pemerintah Indonesia, dan di acara yang sama ditengah keprihatinan Kementerian

Ketenagakerjaan menguji coba penempatan tenaga kerja migran Indonesia pada satu kanal. Dimana sistem ini terkait dengan tujuan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.

Namun pembingkaiian Koran *Kompas* terkait dengan kinerja Jokowi yang masih dianggap kurang juga dilakukan melalui pembingkaiian pada kasus-kasus kemasyarakatan lainnya yang masih menjadi sorotan dan belum terselesaikan. Contohnya pada pemberitaan Kelompok Orang Rimba, dimana hingga saat ini puluhan keluarga Kelompok Orang Rimba di Bukit Suban, masih menumpang hidup darurat dikebun sawit milik penduduk dan menunggu janji Jokowi dalam menyediakan lahan kelola. Pada *framing* ini Koran *Kompas* mencoba menyoroti kinerja Jokowi lainnya yang dianggap masih kurang dan harus dibenahi.

Kemudian jika menilik Koran *Kompas* di bulan Januari 2019, pembingkaiian (*framing*) terhadap kedua tokoh calon presiden justru dapat sangat terlihat. Hal ini dikarenakan beberapa kali Koran *Kompas* dalam membahas mengenai kondisi politik pemilu 2019 menggunakan kolom tersendiri agar pembaca dapat dengan mudah fokus dalam berita khusus pemilu. Diawal bulan

misalnya *framing* kedua tokoh pasangan calon Capres dan Cawapres diperlihatkan melalui penggambaran pemilu damai yang mengedepankan informasi berimbang. Dimana setiap pemberitaannya koran *kompas* mencoba menghadirkan informasi dengan tema yang sama pada kedua belah pihak. Misalnya pada Koran *Kompas* hari Kamis, 3 Januari 2019 yakni Capres dan Cawapres Joko widodo dan Ma'ruf Amin serta Prabowo Subiakto dan Sandiaga Uno kedua sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU datang bersama menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) digedung KPU. Lalu *framing* pemilu damai juga dilakukan melalui penggambaran kalender politik yang mendeskripsikan jadwal hari-hari penting sebelum pemilihan umum hingga proses pemilihan juga jadwal proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Kemudian *framing* pemilu 2019 dilakukan melalui pesan damai dari tulisan mengenai harapan besar tercurah pada pemimpin bangsa yang nantinya akan terpilih agar tidak saja menjalankan amanat pemerintahan tetapi juga sebagai negerawan mereka nantinya diharapkan mampu menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia.

Pada pertengahan bulan Januari proses *framing* Koran *Kompas* juga

dilakukan terkait dengan penggambaran kedua tokoh. Misalnya pada pembingkai berita tentang dukungan kedua Capres yang digambarkan berbeda. Kedua calon presiden menyampaikan pidato visi-misi maupun deklarasi mereka dalam dua kegiatan yang memiliki tema latar belakang berbeda. Pembingkai terjadi pada berita Selasa, 15 Januari 2019, dimana dua foto yang ditampilkan berbeda, yakni:



Gambar 1

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat membacakan pidato kebangsaan bertajuk Indonesia Menang di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam.

Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subiakto, menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema “Menuju Indonesia Menang”, didampingi Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, Senin (14/1/2019), di Jakarta Convention Center. Dalam Kesempatan tersebut Prabowo menyampaikan tawaran visi-misi dan program kerjanya. Disini terlihat bahwa seolah acara proses dukungan itu diadakan atas Inisiatif kedua paslon bukan murni dari masyarakat pendukung.



Gambar 2

Dengan mengayuh sepeda bambu, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menghadiri acara deklarasi dukungan dari para alumni sejumlah universitas negeri di Indonesia. Acara digelar di Plaza Tenggara, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Alumni Universitas Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mengabadikan kehadiran Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo, yang naik sepeda dalam deklarasi dukungan alumni sejumlah perguruan tinggi untuk Jokowi-Ma'ruf di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/1/2019). Berberda dengan Calon Presiden Nomor Urut 02, pada foto ini justru Calon Presiden nomor urut 01 terlihat mendapatkan dukungan yang murni dari inisiatif masyarakat pendukung.

Pada pertengahan bulan Januari 2019, terlihat Koran *Kompas* lebih banyak menyoroti kebijakan yang dilakukan oleh Joko Widodo selaku pemimpin Negara dibandingkan dengan Prabowo sebagai paslon. Misalnya pada Sabtu, 19 Januari 2019, dengan judul berita “Presiden:

Kemanusiaan Menjadi Pertimbangan Utama”. *Kompas* menyoroti keputusan Jokowi yang akan membebaskan terduga teoris Abu Bakar Ba’asyir setelah mendengar masukan berbagai pihak. Dalam bingkai berita tersebut dinyatakan bahwa Alasan kemanusiaan dimana terpidana sudah tua dan kesehatannya sudah menurun menjadi hal utama yang menyebabkan presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir sebagai terpidana teorisme. Dengan mengacu pada peraturan pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga negara binaan pasyarakatan. Dimana dua kriteria syarat telah dipenuhi yakni penandatanganan surat pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI. *Framing* tentang Jokowi merupakan Presiden yang memiliki moral kemanusiaan terlihat melalui gambaran dimana terpidana sudah tua dan kesehatannya sudah menurun menjadi hal utama yang menyebabkan presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir sebagai terpidana teorisme.

Namun pembingkaiian berbeda terjadi pada tanggal 20 Januari 2019 dihari Minggu. *Framing* pada Joko Widodo mengenai kritikan terhadap penanganan HAM yang enggan dilakukan tertuang pada pemberitaan Antara *Wacana Capres dan*

Realitas Rakyat, dalam pemberitaan itu *framing* kritik dilakukan melalui penggambaran Maria Catarina Sumarsih Ibunda Benardus Realino Norman Irawan atau Wawan, yang tewas saat tragedi semanggi I. Beliau menjadi salah satu penggagas acara Kamisan. Dimana dalam acara tersebut beliau menyerahkan buku 12 tahun aksi itu kepada Presiden Joko Widodo.

Acara Kamisan ini menjadi salah satu cara untuk mengingatkan kembali para penguasa terhadap kasus HAM di Indonesia. Dalam acara ini diserahkan buku 12 tahun aksi itu kepada Presiden Joko Widodo. Dalam pemberitaan itu *framing* diperkuat dengan foto Maria Catarina yang berdiri di depan Istana Negara dengan mengenakan pakaian serba hitam, berpayung hitam ditemani beberapa aktivis HAM lainnya yang juga berpakaian serba hitam. Dalam pemberitaan ini proses *framing* mengenai belum dituntaskannya kasus pelanggaran HAM oleh pemimpin juga dilakukan kepada paslon lainnya yakni Prabowo Subianto. Dalam pemberitaan ini keengganan kedua Capres baik Jokowi dan Prabowo dalam pembahasan isu HAM menjadi sorotan yang mana seharusnya persoalan ini menjadi agenda tahunan yang harus diselesaikan.

Dari proses analisis ini dapat menjadikan bukti bahwa proses *framing* sejatinya merupakan keniscayaan bagi media massa. Proses peletakan bingkai pada dasarnya memang dilakukan oleh media dikarenakan media memang tidak mungkin dapat bebas nilai. Melalui proses *framing*, media massa menjadi sebuah ruang dimana informasi diperebutkan melalui simbolisasi tertentu dan menjadi ajang perebutan agar mendapatkan dukungan tertentu oleh beberapa pihak. Sebagai agen konstruksi atas realitas setiap produk jurnalisti dalam hal ini berita, pasti dikonstruksi melalui proses seleksi, dan rekonstruksi yang dilakukan oleh otonomi redaksi. Media melakukan penyeleksian isu, serta di sisi lain mengabaikan isu yang lain dan kemudian melakukan proses konstruksi dan rekonstruksi terhadap sebuah peristiwa.

Hal inilah yang dilakukan Koran *Kompas*. Koran *Kompas* memproduksi informasi sesuai dengan ideologi di dalam ruang redaksinya. Alih-alih ingin mencoba memberikan pemberitaan berimbang, namun pada beberapa kesempatan keberimbangan dalam memilih bingkai informasi justru nyatanya memang akan selalu bergantung pada bagaimana mata ruang redaksi melihat, dimana ruang pembingkai nilai positif Calon Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masih

memiliki jumlah porsi yang sedikit lebih banyak.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat jika kedua pasangan calon selalu mendapat tempat pada pemberitaan di Koran *Kompas* terutama mengenai Pemilihan Umum 2019, bahkan Koran *Kompas* menempatkan Kolom khusus untuk pemberitaan politik yang terkait dengan Pemilihan Umum. Pada keseluruhan Berita di Bulan November-Januari kedua paslon mendapatkan porsi yang sedikit berbeda dalam pemberitaan pemilu 2019.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan.(2008). *“Konstruksi Sosial Media Massa”*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- _____. (2007). *“Sosiologi Komunikasi”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Effendy, Onong Uchjana.(2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Eriyanto (2012), *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media Massa*, Lkis, Yogyakarta.
- Halik, Abdul.(2013). *Buku Daras: Komunikasi Massa*. Makassar: Alaudin University Press.
- Hasyim, Nanang Mizwar. (2016). *Konstruksi Citra Maskulinitas Calon Presiden (Studi Analisis Framing Model Gamson dan Modigliani Pada Pemberitaan Koran Harian Kompas dan Jawa Pos)*. Jurnal Profetik 9(01): 32-50
- Herdiansah, Ari Ganjar. (2017). *Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu Di Indonesia Pasca 2014*. Jurnal Bawaslu 3(2): 169-304
- Hutagalung, Inge. (2013). *Dinamika Sistem Pers Indonesia*. Jurnal Interaksi 2 (2): 53-60
- Ispandriarno, Lukas S. dkk. (Ed). 2002. *Media – Militer – Politik (Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional)*. Yogyakarta: Galang Press.
- Kriyantono, R (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik,dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryana, A’an. (2017). *Analisis Isi Pemberitaan Media Tentang Kebebasan Beragama dan Toleransi Antar Umat Beragam Di Indonesia*. Search for Common Ground
- Wibisono, Haryo Kunto. (2018). *Media Sosial Jadi Arena Vigilantisme Digital*

Jelang Pemilu 2019. Diakses di
<https://theconversation.com/media-sosial-jadi-arena-vigilantisme-digital-jelang-pemilu-2019-101632> pada tanggal
25 November 2018.

Koran *Kompas* Edisi Bulan November-
Maret 2019.